

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA  
WISATA UNTUK MEWUJUDKAN *COMMUNITY BASED TOURISM* (CBT)  
(Studi Penelitian Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**

**Essa Rella Pangestu, Nunik Retno Herawati, dan Neny Marlina**

Email: [essarellapangestu@gmail.com](mailto:essarellapangestu@gmail.com)

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, SH. Tembalang, Semarang Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Di Desa Pandansari terdapat asumsi bahwa pemerintah desanya belum berperan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Pandansari. Seharusnya pemerintah memiliki peranan yang signifikan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat merealisasikan desa wisata berbasis CBT. Penelitian ini menganalisis mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pandansari untuk mewujudkan CBT. Analisis didasarkan pada Teori Peran Pemerintah dari Pitana dan Gayantri (2005) yang meliputi peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator, serta Tahapan Pemberdayaan dari Wirhatnolo, dkk (2007) berupa tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan penyediaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pandansari telah mencapai ketiga tahap pemberdayaan masyarakat. Adapun instansi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pandansari meliputi Pemerintah Kec. Warungasem dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai fasilitator, serta Disparpora Kab. Batang yang berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator meskipun perannya sebagai dinamisator cenderung masih terbatas. Sedangkan Pemerintah Desa Pandansari hanya berperan dalam hal pemberkasan dan sebagai penyalur saja. Meskipun minimnya peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Pandansari, konsep CBT berhasil diterapkan di Desa Wisata Pandansari. Hal ini disebabkan terdapat komunitas masyarakat lokal Kopal Etom yang memiliki peranan kuat dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya peran pemerintah sebagai fasilitator juga menjadi pendukung proses pengkapasitasan manusia sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat lokal untuk mengelola Desa Wisata Pandansari. Adapun saran yang direkomendasikan adalah instansi pemerintah dapat meningkatkan peranannya khususnya sebagai fasilitator yang berkaitan dengan upaya pengkapasitasan manusia dan dinamisator dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Community Based Tourism*

## **ABSTRACT**

*In Pandansari Village, there is an assumption that the village government has not played a role in community empowerment to support the development of Pandansari Tourism Village. The government should have a significant role in implementing community empowerment so that it can realize a CBT-based tourist village. This study analyzes the role of the government in community empowerment in Pandansari Tourism Village to realize CBT. The analysis is based on the Role of Government Theory from Pitana and Gayantri (2005) which includes the role of government as a motivator, facilitator, and dynamizer, as well as the Stages of Empowerment from Wirhatnolo, et al (2007) in the form of awareness, capacity building, and provisioning stages. The method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews and documentation. The results showed that the Pandansari Village community has achieved all three stages of community empowerment. The agencies involved in community empowerment in Pandansari Village include the Warungasem Sub-district Government and the Central Java Provincial Disporapar which act as facilitators, as well as the Batang Regency Disparpora which acts as a motivator, facilitator, and dynamizer, although its role as a dynamizer tends to be limited. Meanwhile, the Pandansari Village Government only plays a role in terms of filing and as a distributor. Despite the minimal role of the government in supporting community empowerment in Pandansari Village, the CBT concept was successfully implemented in Pandansari Tourism Village. This is due to the local community Kopal Etom, which has a strong role in seeking community empowerment. In addition, the role of the government as a facilitator also supports the process of human capacity building so as to increase the understanding and skills of local communities to manage Pandansari Tourism Village. The recommended suggestion is that government agencies can increase their role, especially as facilitators related to human capacity building efforts and dynamizers by conducting regular monitoring and evaluation.*

**Keywords: Government Role, Community Empowerment, Tourism Village, Community Based Tourism**

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terdapat konsep yang dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencerminkan kerja sama sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rukayat, 2021). Menurut Riyanto (2019), tata kelola

pemerintah yang efektif dapat mempengaruhi pembangunan pariwisata di suatu negara. Berdasarkan laporan *Tourism Trends and Policies 2022* oleh OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*), menyatakan bahwa sektor pariwisata pada tahun 2019 menyumbang 5,0% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Purwowidhu, 2023). Salah

satu program dalam pembangunan sektor pariwisata ialah dengan mendorong pengembangan desa wisata. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan ada istiadat desa. Oleh sebab itu, penting untuk disadari bahwa dalam proses pembangunan desa, masyarakat lokal tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri (Utami, 2019). Dengan demikian, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah supaya menciptakan kemandirian, berpikir inovatif dan kreatif, serta memiliki inisiatif tinggi untuk berperan dalam proses pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep pengembangan desa wisata berbasis komunitas (masyarakat), yang dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT).

CBT merupakan pemberdayaan desa wisata berbasis masyarakat, karena dalam kegiatan pariwisata daerah, masyarakat lokal ditempatkan sebagai pihak yang memainkan peran utama (Tamianingsih & Eprilianto, 2022). Dengan mengimplementasikan konsep CBT maka

pengembangan dan pemberdayaan desa wisata di Indonesia diharapkan berjalan secara berkelanjutan dan dinamis (Febriandhika & Teguh 2019). Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjaga kontinuitas dan pengembangan desa wisata sekaligus sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, hingga kini, terdapat asumsi yang menunjukkan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam inisiatif pengembangan desa wisata termasuk dalam menciptakan program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Pentingnya peran pemerintah dalam pengembangan wisata terlihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Farhah Kamilatun Nuha (2022) di Desa Wisata Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dan Susi Iswanti & Zulkarnaini (2022) di Pulau Tilan, Kepenghuluan Rantai Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peranan yang signifikan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam mendukung upaya pengembangan wisata lokal. Meski dalam realisasinya masih belum optimal, dikarenakan masih terbatasnya peran pemerintah, sumber daya manusia, serta kurangnya keterlibatan

masyarakat dalam pengembangan objek wisata. Di samping itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Riski Windarsari, dkk (2021) dan Nurbaiti Usman, dkk (2022) yang mengkaji mengenai seberapa besar peran pemerintah dalam mengembangkan maupun memberdayakan desa wisata untuk mewujudkan *community based tourism*. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pengaruh untuk mewujudkan desa wisata berbasis CBT. Dengan demikian adanya asumsi kurangnya keterlibatan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan CBT menjadi aspek yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Nurhidayati dan Fandeli menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya di sekitar kawasan wisata, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sehingga manfaatnya juga ditujukan bagi masyarakat setempat (Prakoso, dkk., 2020). Dalam konteks Desa Wisata Pandansari, konsep ini sebenarnya telah diterapkan sejak awal, diketahui dari pengelolaan Desa Wisata Pandansari yang berada di bawah komunitas masyarakat Kopal Etom dan kelompok sadar wisata Arum Sari. Kondisi inilah yang mengakibatkan adanya keterbatasan dalam penyediaan fasilitas

wisata maupun dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Wildan (2022) mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Pandansari belum memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Desa Wisata Pandansari. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional (Suprpto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengelola desa wisata, pemerintah desa dan daerah, serta pihak swasta untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Desa Wisata Pandansari diketahui telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora), serta pihak swasta seperti PLN. Namun, hingga kini, kontribusi nyata dari Pemerintah Desa Pandansari dalam pengembangan desa wisata belum terlihat secara jelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa Pandansari maupun pemerintah Kabupaten Batang dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mewujudkan Desa Wisata Pandansari yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, berupa pendekatan studi yang mencakup eksplorasi secara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data yang ditulis secara deskriptif dengan struktur fleksibel. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses penelitian, berupa pelaksanaan wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui olahan penelusuran data yang bersumber dari lembaga berwenang, buku/literatur/jurnal ilmiah, internet, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai informasi tambahan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, berupa *purposive sampling*. Adapun informan yang dipilih terdiri dari, Maskun S.E selaku Kasi Bidang Usaha Pariwisata Disparpora Kab. Batang, Ida Purwanti,S.Pd selaku Kasih Bidang Pemasaran Disparpora Kab. Batang, Suwanto,S.E selaku Kasi PMKS (Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial) Kec. Warungasem, Eko Risqianto selaku Kepala Desa Pandansari, Aminudin selaku Ketua Kopal

Etom, Mutrofin selaku Bendahara Kopal Etom, Zahrotul Jannah selaku Anggota Kopal Etom, dan Dayati selaku masyarakat Desa Pandansari.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (1984) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Adapun dalam menguji kredibilitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode, serta berbagai waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandansari**

#### **1. Tahap Penyadaran**

Pada tahap ini, masyarakat harus disadarkan dahulu mengenai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Dalam kondisi pengembangan Desa Wisata Pandansari, diketahui bahwa sebagian masyarakat Desa Pandansari telah memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata. Kondisi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, di mana menunjukkan bahwa Desa Wisata Pandansari dipelopori oleh komunitas masyarakat Kopal Etom. Mulanya, Kopal

Etom secara sukarela melakukan pemetaan potensi desa dan dipilihnya potensi alam berupa irigasi Sungai Kupang. Dengan demikian, kesadaran masyarakat Desa Pandansari untuk memanfaatkan peluang dan mengolahnya sebagai suatu destinasi wisata sudah ada sejak awal perintisan Desa Wisata Pandansari.

Selain itu, bagi masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Pandansari juga terlihat sudah memiliki kesadaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat lokal yang memanfaatkan peluang usaha dari adanya desa wisata, yaitu dengan berdagang, melakukan penyewaan ban sebagai perlatan wisata air, penyewaan lahan parkir, dan penyewaan *homestay* yang bekerja sama dengan Pokdarwis Arum Sari.

Seiring berjalannya waktu, proses penyadaran juga terus dilakukan. Terlihat dari meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Pandansari dan munculnya beberapa peluang usaha baru. Dengan demikian tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pandansari telah tercapai.

## **2. Tahap Pengkapisitan**

### **a) Pengkapisitan Manusia**

Pengkapisitan ini berhubungan dengan tindakan untuk meningkatkan kemampuan

manusia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan. Pengkapisitan SDM bagi yang tergabung menjadi pengelola Desa Wisata Pandansari umumnya diberi edukasi baik secara materi maupun praktik untuk mewujudkan kemandirian sehingga mampu mengelola desa wisata sesuai dengan kapasitas masyarakatnya.

Adapun upaya pengkapisitan terlihat melalui pemberian pelatihan secara internal oleh Kopal Etom sekaligus Pokdarwis Arum Sari dengan mengirimkan beberapa anggotanya untuk mengikuti ToT (*Training of Trainer*) untuk meningkatkan kualitas SDM-nya dan mendapatkan sertifikasi.

Adapun secara eksternal, upaya pengkapisitan SDM dilakukan oleh sektor pemerintah. Pertama, Pemerintah Kec. Warungasem, diketahui pernah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pandansari tahun 2015-2016. Kedua, Disparpora Kab. Batang, pemerintah Kab. Batang terlibat dengan Desa Wisata Pandansari sejak tahun 2015 ketika Kopal Etom mengikuti kompetisi *icon* kecamatan dan menjadi salah

satu pemenangnya sehingga mendapat dukungan percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan peralatan serta perlengkapan wisata.

Kerja sama antara Pokdarwis Arum Sari dengan Pemerintah Kab. Batang terus berlanjut hingga sekarang, khususnya dengan Disparpora Kab. Batang. Oleh sebab itu, sebagai pembina dari pengembangan desa wisata di Kab. Batang, Disparpora Kab. Batang juga mengupayakan pengkapasitasan SDM dengan memberikan pelatihan, seminar/sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pokdariws-pokdarwis di Kab. Batang.

Ketiga, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, diketahui pernah mengadakan pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di mana Pokdarwis Arum Sari menjadi salah satu pesertanya. Selain itu, diketahui juga pernah mengadakan sosialisasi dan mengikutsertakan Pokdarwis Arum Sari sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM.

Selain ditujukan bagi pengelola Desa Wisata Pandansari, pengkapasitasan masyarakat juga ditujukan bagi masyarakat Desa Pandansari secara umum.

Diketahui, terdapat upaya pengkapasitasan SDM yang dilakukan oleh Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) kepada masyarakat Desa Pandansari dengan memberikan pelatihan kuliner. Selain itu, Disparpora Kab. Batang juga tercatat pernah memberikan pelatihan kuliner kepada beberapa masyarakat Desa Pandansari terpilih yang diadakan di Kabupaten Batang. Pelatihan kuliner dipilih karena Desa Pandansari memiliki UMKM olahan opak singkong yang khas sehingga baik Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) maupun Disparpora Kab. Batang berusaha untuk mendukung UMKM tersebut.

#### b) Pengkapasitasan Organisasi

Pengkapasitasan ini merujuk pada restrukturisasi organisasi yang diberdayakan, supaya tercipta manajemen organisasi yang lebih efisien dan inovatif. Hal ini berkaitan dengan pengkapasitasan organisasi dari Kopal Etom sekaligus Pokdarwis Arum Sari. Efisien yang dimaksud adalah adanya rekrutmen anggota sebagai langkah dari reorganisasi pengelola Desa Wisata Pandansari dengan memberikan beberapa persyaratan

bagi calon anggota dan dilakukannya proses seleksi. Hal ini bertujuan untuk menjaring calon-calon anggota supaya sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai pengelola Desa Wisata Pandansari.

Adapun inovasi diwujudkan melalui adanya rekrutmen terbuka bagi masyarakat yang berminat. Mulanya rekrutmen anggota hanya difokuskan untuk masyarakat lokal saja. Namun, seiring berjalannya waktu proses rekrutmen pengelola Desa Wisata Pandansari ditujukan untuk seluruh masyarakat, bahkan di luar Desa Pandansari, bagi yang ingin berpartisipasi sebagai pengelola Desa Wisata Pandansari.

- c) Pengkapasitasan Sistem Nilai
- Pengkapasitasan ini merujuk pada penetapan regulasi dalam suatu entitas organisasi yang harus ditaati oleh setiap anggotanya untuk mewujudkan tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat. Di Desa Wisata Pandansari selain SK Disparpora Kab. Batang Nomor 556/205/2021 yang meresmikan Pokdarwis Arum Sari sebagai pokdarwis Desa Wisata Pandansari, belum ada regulasi lainnya yang mengatur secara khusus. Disparpora Kab. Batang

dalam melakukan pembinaan, pengembangan, maupun pengelolaan desa wisata masih berpedoman pada Pergub Privinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019.

### **3. Tahap Pendayaan**

Dalam tahap ini, masyarakat lokal diberi peluang, kekuasaan, kekuatan, maupun otoritas yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Di Desa Wisata Pandansari proses penyerahan kekuasaan telah diberikan sejak awal perintisan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang tergabung dalam Kopal Etom sehingga sudah sepatutnya komunitas meminta izin kepada pemerintah desa setempat.

Selain itu, adanya tindakan pendayaan juga terlihat dari pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Pandansari yang sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Di mana pengembangan dan pengelolaan memang berada di bawah Kopal Etom dan Pokdarwis Arum Sari bukan berada di BUMDes Pandansari. Disparpora Kab. Batang juga memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada masyarakat Desa Pandansari untuk mengelola desa wisata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, Disparpora Kab. Batang tetap melakukan pemantauan dan pembinaan kepada Pokdarwis Arum Sari.

## **Peran Pemerintah Dalam PEMBERDAYAAN SDM Desa Wisata Pandansari**

### **1. Peran Motivator**

Peran motivator pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan memberikan dorongan (motivasi) kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan pengelolaan wisata. Peran pemerintah sebagai motivator umumnya terlihat dengan mengajak masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Pandansari. Berdasarkan data yang didapat, diketahui bahwa pemerintah yang berperan sebagai motivator adalah Disparpora Kab. Batang.

Disparpora Kab. Batang cenderung memberikan motivasi kepada anggota Kopal Etom maupun Pokdarwis Arum Sari secara langsung melalui Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Batang, maupun tidak langsung dengan menyisipkan motivasi pada pemberian pelatihan ataupun seminar/sosialisasi. Motivasi tersebut adalah untuk memotivasi dan memberikan amanah kepada Pokdariwis Arum Sari supaya terus melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisatanya.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Pandansari tidak memiliki peran sebagai motivator dalam pemberdayaan

masyarakat untuk Desa Wisata Pandansari. Hal ini dikarenakan, pengelolaan Desa Wisata Pandansari tidak berada di BUMDes Pandansari sejak awal dirintis hingga sekarang, disebabkan belum aktifnya BUMDes Pandansari.

### **2. Peran Fasilitator**

Peran fasilitator mencakup segala bentuk dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang mendukung seluruh program pengelolaan desa wisata (Pitana dan Gatantri, 2005). Meski wisata di Desa Pandansari telah dibuka untuk pengunjung sejak tahun 2013, namun keterlibatan pemerintah dalam Desa Wisata Pandansari baru terjadi di tahun 2015. Bermula dari keikutsertaan Kopal Etom dalam kompetisi *icon* kecamatan yang diajak oleh Pemerintah Kec. Warungasem pada tahun 2015 silam. Dalam kompetisi tersebut, Desa Wisata Pandansari menjadi salah satu pemenang dan mendapat dana dukungan untuk percepatan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Batang.

Di sisi lain, terpilihnya Desa Wisata Pandansari sebagai *icon* Kec. Warungasem, menyebabkan Desa Wisata Pandansari dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kec. Warungasem pada tahun 2015-2016 karena Kec. Warungasem juga mendapat dukungan pendanaan oleh Pemerintah Kab. Batang. Oleh sebab itu, Pemerintah Kec. Warungasem sempat memberikan fasilitas

berupa pemberian sosialisasi kesadaran wisata kepada *guide river tubing*.

Sementara itu, Disparpora Kab. Batang yang mewadahi Dinas Pariwisata umumnya memiliki peranan yang signifikan sebagai fasilitator dalam tahapan pemberdayaan masyarakat di desa wisata. Disparpora Kab. Batang memiliki tugas pembinaan dan harus memberikan dukungan kepada desa wisata yang ada di Kab. Batang, khususnya dukungan berbentuk pemberdayaan SDM. Oleh karena itu, Disparpora Kab. Batang berusaha semaksimal mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kapabilitas sumber daya manusianya. Beberapa pelatihan yang pernah diberikan oleh Disparpora Kab. Batang di antaranya adalah Pelatihan Tata Kelola *Homestay*, Pelatihan Tata Kelola Desa Wisata, Pelatihan *Digital Marketing*, Sosialisasi Kesadaran Wisata, dan Bimbingan Teknis. Adapun pelatihan khusus yang diperuntukkan bagi satu desa wisata saja, belum pernah terjadi.

Salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Disparpora Kab. Batang adalah Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Wisata Kab. Batang yang dilaksanakan di Desa Wisata Pandansari pada November 2021. Bimbingan teknis ini ditujukan untuk mempertemukan visi dan komitmen bersama antara *stakeholder* dengan pengelola deswita yang ada di Kabupaten

Batang, sebagai dukungan dalam proses pengembangan desa wisata. Adanya bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Batang dapat semakin berkembang dan dapat terus melibatkan peran partisipasi masyarakat secara langsung dalam pokdarwis. Kegiatan ini semacam forum diskusi antar pokdarwis Kabupaten Batang yang mendiskusikan mengenai potensi SDM, SDA, ataupun faktor pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai dukungan untuk mewujudkan pengelolaan manajemen wisata yang lebih baik.

Dalam mewujudkan perannya sebagai fasilitator, Disparpora Kab. Batang juga tetap mengedepankan inovasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya pada saat pandemi Covid-19, Disparpora Kab. Batang diketahui memberikan sosialisasi “Jogo Plesiran” yang membahas mengenai tata cara pelaksanaan wisata saat pandemi. Pemberian sosialisasi Jogo Plesiran tersebut merupakan wujud inovasi dari Disparpora Kab. Batang dalam menyikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masa itu.

Selain memfasilitasi pelatihan, sosialisasi, maupun bimbingan teknis, Disparpora Kab. Batang juga memberikan wadah untuk berkomunikasi antar seluruh pokdarwis di Kab. Batang. Yaitu dengan membentuk Forum Komunikasi Desa

Wisata Kabupaten Batang. Forum tersebut dapat digunakan sebagai tempat berdiskusi atau saling tukar pikiran, berkomunikasi, saling belajar satu sama lain, dan berkolaborasi antara pokdarwis di masing-masing desa wisata yang ada di Kab. Batang.

Selanjutnya, Disparpora Kab. Batang juga memberikan fasilitas berupa dukungan dalam melakukan promosi (*marketing*). Promosi tersebut dilakukan melalui beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Walaupun di antara ketiga media sosial tersebut, Disparpora Kab. Batang cenderung lebih aktif melalui Instagram dan Facebook. Di samping itu, promosi desa wisata juga dibantu oleh Duta Wisata Kab. Batang yang terpilih. Akan tetapi, berdasarkan data yang didapat tidak semua Duta Wisata Kab. Batang yang terpilih melakukan promosi Desa Wisata Pandansari. Tercatat promosi wisata pernah dilakukan oleh Retno Diah I. sebagai Juara 2 Duta Wisata Kab. Batang 2024 melalui akun Instagram pribadinya @Retnodiiss. Di mana Retno dan kawan-kawannya menyarankan desa wisata di Kabupaten Batang yang salah satunya menyebutkan Desa Wisata Pandansari.

Selain itu, Disparpora Kab. Batang juga melakukan promosi dengan pembuatan *leaflet* yang dilakukan setahun sekali. *Leaflet* tersebut berisi informasi-informasi seputar wisata di Kabupaten

Batang, termasuk Desa Wisata Pandansari. *Leaflet* tersebut dibuat dan dibagikan kepada masyarakat umum ketika terdapat *event-event* tertentu, misalnya seperti *event* Batang *Expo*.

Kerja sama yang terjalin antara Disparpora Kab. Batang dengan Kopal Etom atau Pokdarwis Arum Sari Desa Wisata Pandansari dapat berjalan lancar dikarenakan terdapat perjanjian kerja sama (MoU). Adanya kerja sama tersebut berdampak pada kontribusi Desa Wisata Pandansari terhadap PAD Kabupaten Batang. Diketahui Desa Wisata Pandansari memberikan kontribusi sebesar 25% kepada PAD Kabupaten Batang, yang diserahkan kepada Disparpora Kab. Batang sejak tahun 2018.

Akan tetapi, pemberian fasilitas dari Disparpora Kab. Batang juga belum dapat dikatakan maksimal. Misalnya dalam pemberian fasilitas berupa ban untuk wisata *river tubing*. Berdasarkan data yang didapat, Disparpora Kab. Batang tidak dapat membantu fasilitas dengan jumlah yang banyak dikarenakan terkendala anggaran. Oleh karena itu, pemberian fasilitas masih dilakukan dalam skala yang kecil, dan hanya bertujuan sebagai stimulan saja. Misalnya ketika Desa Wisata Pandansari membutuhkan sekitar 15 ban, maka Disparpora Kab. Batang hanya dapat memberikan fasilitas ban sejumlah 1 atau 2 buah saja. Di sisi lain, Disparpora Kab.

Batang juga mengaku bahwa sebenarnya Desa Wisata Pandansari sudah termasuk mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kondisi tersebut sebenarnya juga berlaku dalam pemberian fasilitas berupa pelatihan. Berdasarkan data yang didapat, menurut Disparpora Kab. Batang, memang idealnya pelatihan dilaksanakan secara rutin dan memiliki target tertentu. Namun, dikarenakan kondisi APBD Disparpora Kab. Batang yang tidak menentu sehingga Disparpora Kab. Batang harus menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang dimiliki. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya Disparpora Kab. Batang sudah memiliki pemahaman dan keinginan mengenai realisasi pelatihan yang seharusnya dilakukan secara berjenjang. Namun, dalam eksekusinya masih belum sempurna karena terkendala anggaran.

Pelaksanaan pelatihan yang masih terbatas juga berdampak pada implementasi materi pelatihan yang tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan Pelatihan Digital *Marketing* yang mengalami kesulitan dalam implementasinya. Berdasarkan data yang didapat, beberapa anggota Pokdarwis Arum Sari pernah mengikuti Pelatihan Digital *Marketing*, di mana peserta pelatihan diajari tata cara pembuatan dan pengelolaan *website* sebagai media promosi wisata, termasuk tata cara pembuatan *link*

sekaligus *contact person*. Namun, realisasinya hanya berjalan selama beberapa bulan sejak pelatihan saja, dan belum bisa diterapkan secara konsisten dan permanen. Hal ini dikarenakan, terdapat keterbatasan kemampuan SDM untuk memahami IT dan melakukan pengelolaan digital *marketing*. Selain itu, diketahui dalam *marketing* melalui *website* ada aspek yang berbayar. Kondisi tersebut berdampak pada kecenderungan Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) yang tidak melanjutkan promosi melalui *website*.

Disisi lain, Desa Wisata Pandansari juga mendapat dukungan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berupa pemberian pelatihan dan dana untuk keberlanjutan Desa Wisata Pandansari. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah umumnya dilakukan di Semarang dan berlangsung 2-3 hari. Adapun dukungan pemberian dana bersumber dari Bankeu Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 100 juta di tahun 2020.

Adapun peran fasilitator dari Pemerintah Desa Pandansari dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pandansari cenderung lebih minim dibandingkan dengan Disparpora Kab. Batang. Hal ini dikarenakan pengelolaan Desa Wisata Pandansari tidak berada di bawah BUMDes, melainkan berada di bawah Kopal Etom dan Pokdarwis Arum

Sari. Alasan yang mendasari kondisi tersebut ialah BUMDes Pandansari belum berjalan dengan aktif sehingga belum mampu mengelola usaha-usaha masyarakat, termasuk Desa Wisata Pandansari.

Peran Pemerintah Desa Pandansari sebagai fasilitator terlihat ketika diperlukan dalam pemberkasan untuk perizinan. Dalam proses aktivitas Desa Wisata Pandansari yang memanfaatkan potensi alam aliran sungai, harus meminta izin terlebih dahulu dengan mengajukan perizinan pemanfaatan air kepada kementerian SDM. Adapun dalam berkas perizinan tersebut dibutuhkan tanda tangan dari Pemerintah Desa Pandansari selaku pemangku kepentingan tingkat desa. Berkas-berkas perizinan yang dibutuhkan beserta alur pengajuannya sepenuhnya diurus oleh Kopal Etom. Dengan demikian, Pemerintah Desa Pandansari membantu Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) dengan pemberian tanda tangan sebagai syarat legalitas dan artian bahwa permohonan perizinan tersebut didukung oleh pihak desa.

Di samping itu, Pemerintah Desa Pandansari juga berperan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan bersama Kopal Etom maupun Pokdarwis Arum Sari. Umumnya kegiatan kepariwisataan tersebut di koordinir oleh Disparpora Kab. Batang

ataupun diinformasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa Pandansari. Kegiatan tersebut biasanya mengharuskan perwakilan berjumlah dua orang, yang terdiri dari Pemerintah Desa Pandansari dan Kopal Etom.

Adapun bentuk pemberian fasilitas dari Pemerintah Desa Pandansari kepada Kopal Etom hanya sebatas kerja sama berupa penyewaan lahan bengkok milik desa untuk kegiatan desa wisata. Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) berharap lahan tersebut dapat dikelola secara leluasa untuk kepentingan Desa Wisata Pandansari sehingga berdampak pada terjalannya kerja sama dengan Pemerintah Desa Pandansari yang lebih mendalam, serta dapat memberikan kontribusi berupa bagi hasil pendapatan ke kas Desa Pandansari.

Harapan ini sebenarnya sudah didiskusikan dengan Kepala Desa Pandansari. Akan tetapi, karena kewenangan atas lahan bengkok tersebut bukan atas nama kepala desa melainkan perangkat desa lainnya, sehingga Kepala Desa Pandansari hanya bisa membujuk perangkat desa tersebut untuk mendukung terjalannya kerja sama lebih mendalam dengan Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari). Namun hingga sekarang, hal tersebut belum terealisasi sehingga belum terjadi kerja sama yang ideal antara Pemerintah Desa Pandansari dengan Kopal Etom.

### 3. Peran Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk dilakukan sebagai upaya menciptakan sinergi antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan Desa Wisata Pandansari, Dalam kondisi Desa Wisata Pandansari, meskipun telah terjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti PLN, kelompok sadar wisata lainnya, pemerintah Kabupaten Batang, dan lain sebagainya, proses kerja sama tersebut cenderung lebih sering dilakukan secara mandiri oleh Kopal Etom.

Disparpora Kab. Batang berperan sebagai dinamisator dalam tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pandansari hanya sebatas mengetahui proses kerja samanya saja. Yaitu kerja sama antara Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) dengan PLN. Keterlibatan lebih lanjut dari Disparpora hanya dapat terjadi apabila kerja sama tersebut memerlukan koordinasi dengan dinas pariwisata. Hal ini dikarenakan Disparpora Kab. Batang memberikan keleluasaan kepada pokdarwis-pokdarwis di Kabupaten Batang untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal lainnya.

Dalam kondisi kerja sama Desa Wisata Pandansari, peluang untuk menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal lainnya menjadi terbatas karena Kopal Etom (Pokdarwis Arum Sari) telah menjalin kerja sama dengan PLN. Berdasarkan data yang didapat, pihak yang bekerja sama dengan PLN cenderung tidak melibatkan mitra lain. Hal ini berkaitan dengan prinsip loyalitas dalam kerja sama antara pihak-pihak terkait. Meskipun hanya bekerja sama dengan satu pihak, yaitu PLN, dukungan yang diberikan oleh PLN biasanya bersifat signifikan dan mencakup berbagai kebutuhan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

Selain itu, Disparpora juga mendukung kerja sama pokdarwis dengan pihak eksternal lainnya, yaitu dengan menyediakan informasi peluang kerja sama melalui Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Batang. Namun, keputusan untuk menjalin kerja sama tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kelompok sadar wisata.

#### *Community Based Tourism*

Desa Wisata Pandansari dirintis sejak tahun 2012 oleh komunitas Kopal Etom. Di mana komunitas tersebut beranggotakan masyarakat Desa Pandansari yang tergabung sebagai sesama pecinta alam. Oleh sebab itu, sejak perintisan hingga pengembangannya sampai saat ini, Desa

Wisata Pandansari telah menerapkan konsep desa wisata berbasis komunitas (masyarakat) yang disebut juga *Community Based Tourism* (CBT). Dalam proses pengembangan dan pengelolaannya sudah terdapat upaya pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat lokal Desa Pandansari. Di mana masyarakat Desa Pandansari diajak dan diikutsertakan sebagai pengelola utama dari pengembangan Desa Wisata Pandansari.

Desa Wisata Pandansari termasuk dalam aktivitas pariwisata yang mendukung CBT, yang termasuk dalam aktivitas Ekowisata. Ekowisata merupakan pariwisata yang meliputi konservasi, konsentrasi ekonomi lokal, serta sebagai penunjang pelestarian kebudayaan lokal (Azizah, dkk., 2021). Dalam Desa Wisata Pandansari pengelolaan sumber daya lokal meliputi sumber daya alam berupa irigasi Sungai Kupang dan sumber daya manusia berupa masyarakat Desa Pandansari yang terlibat langsung dalam pengelolaan Desa Wisata Pandansari.

Konsep CBT diartikan sebagai pengelolaan Desa Wisata Pandansari yang menjadi wujud nyata pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) yang dilihat dari karakteristik pengelolaan Desa Wisata Pandansari, manfaat yang dihasilkan, dan partisipasi masyarakat Desa Pandansari.

#### a) Karakteristik Pengelolaan Desa Wisata Pandansari

Dalam CBT, karakteristik pengelolaan desa wisata dikelola oleh masyarakat setempat dengan memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata. Implementasi adanya karakteristik sesuai dengan definisi CBT di Desa Wisata Pandansari terlihat melalui, pertama, pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh komunitas Kopal Etom sekaligus pokdarwis Arum Sari tanpa adanya keterlibatan yang besar dari Pemerintah Desa Pandansari, Kedua, Kopal Etom dan Pokdarwis Arum Sari memiliki akses penuh dalam pengelolaan Desa Wisata Pandansari. Ketiga, masyarakat Desa Pandansari diajak dan diperbolehkan bergabung dalam pengelolaan Desa Wisata Pandansari.

#### b) Manfaat Yang Dihasilkan

Dalam definisi CBT, manfaat yang dihasilkan dimaksudkan bahwa masyarakat lokal yang terlibat maupun tidak terlibat dalam pengelolaan, sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan dari adanya desa wisata di lingkungannya. Kondisi tersebut terlihat di Desa Wisata Pandansari yang dibuktikan melalui, tumbuhnya usaha baru di lingkungan sekitar Desa Wisata Pandansari, seperti pedagang

kuliner, usaha homestay, penyewaan lahan parkir dan ban, serta pelaku UMKM opak singkong yang diuntungkan dengan adanya Desa Wisata Pandansari di mana pengelola Desa Wisata Pandansari ikut membantu mendistribusikan opak singkong dari masyarakat Desa Pandansari sebagai kuliner khas Desa Pandansari dan masuk dalam paket wisata.

c) Partisipasi Masyarakat Desa Pandansari

Dalam definisi CBT, Partisipasi masyarakat dimaksudkan adanya tuntutan pemberdayaan masyarakat secara politik dan demokratisasi serta adanya distribusi keuntungan kepada komunitas maupun masyarakat setempat. Kondisi tersebut diwujudkan di Desa Wisata Pandansari dibuktikan melalui hasil pendapatan Desa Wisata Pandansari didistribusikan kepada pengelola desa wisata serta sebagai investasi untuk pengembangan objek wisata di Desa Wisata Pandansari, dan juga disalurkan kepada masyarakat Desa Pandansari melalui pembagian sembako, bantuan bencana alam, dukungan belajar dengan penyediaan WiFi, serta *event* pembagian takjil saat bulan Ramadhan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan proses CBT sudah diterapkan di Desa Wisata Pandansari sejak dirintis. Hal ini disebabkan, perintisan telah dilakukan oleh komunitas masyarakat Kopal Etom yang juga mengajak masyarakat lokal lainnya untuk ikut bergabung. Akan tetapi, karena terdapat keterbatasan fasilitas sehingga masyarakat Desa Pandansari membutuhkan dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah yang berperan sebagai fasilitator.

Dukungan dari pemerintah bermula saat Kopal Etom berpartisipasi dalam kompetisi *icon* kecamatan pada tahun 2015. Dukungan tersebut diperoleh dari Disparpora Kab. Batang dan Pemerintah Kec. Warungasem berupa peningkatan fasilitas dan peralatan di Desa Wisata Pandansari. Dukungan lainnya juga didapat dengan pemberian fasilitas berupa pengkapasitasan SDM oleh Pemerintah Kec. Warungasem, Disparpora Kab. Batang, dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Dukungan tersebut memberikan dampak meningkatnya kapasitas SDM di Desa Wisata Pandansari sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam mengelola Desa Wisata Pandansari. Dengan demikian, peran dari pemerintah yang berpengaruh dan mendukung terwujudnya Desa Wisata Pandansari berbasis CBT adalah peran fasilitator.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pandansari, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, terdapat instansi-instansi pemerintah yang terlibat. Di antaranya adalah Pemerintah Kec. Warungasem, Disparpora Kab. Batang, dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga instansi yang tersebut memiliki perannya masing-masing, Pertama, peran pemerintah sebagai motivator, instansi pemerintah yang berperan ialah Disparpora Kab. Batang. Di mana Disparpora Kab. Batang memberikan dukungan berupa motivasi kepada Kopal Etom maupun Pokdarwis Arum Sari. Kedua, peran pemerintah sebagai fasilitator, instansi pemerintah yang berperan ialah Pemerintah Kec. Warungasem, Disparpora Kab. Batang, dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, peran pemerintah sebagai dinamisator, instansi pemerintah yang berperan ialah Disparpora Kab. Batang. Meskipun peran sebagai dinamisatornya cenderung masih sangat terbatas. Di mana Disparpora Kab. Batang sebagai dinamisator hanya sekadar sebagai pihak yang mengetahui dan pengamat saja.

Di samping masih minimnya peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa

Pandansari, konsep *Community Based Tourism* (CBT) telah berhasil diterapkan di Desa Wisata Pandansari. Hal ini disebabkan, di Desa Pandansari terdapat komunitas dari masyarakat lokal Kopal Etom yang memiliki peranan yang kuat. Yaitu telah berupaya memberdayakan masyarakat lokal Desa Pandansari dengan cara mengikutsertakan mereka dalam pengelolaan Desa Wisata Pandansari.

Namun, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kopal Etom juga mengalami keterbatasan sehingga peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan. Khususnya peranan pemerintah sebagai fasilitator, di mana ketiga instansi tersebut memberikan dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang dapat mendukung pengkapasitasan SDM sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa Pandansari untuk mendukung pengelolaan Desa Wisata Pandansari.

Dengan demikian, meski ketiga peran pemerintah tersebut belum sepenuhnya terwujud, konsep CBT masih dapat diterapkan di Desa Wisata Pandansari karena memiliki komunitas yang kuat dan adanya dukungan dari pemerintah khususnya peranannya sebagai fasilitator juga meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat yang berdampak terwujudnya Desa Wisata Pandansari berbasis CBT.

## SARAN

### 1. Bagi Pemerintah Desa Pandansari

Diharapkan dapat membangun kerja sama yang lebih mendalam dengan Kopal Etom sekaligus Pokdarwis Arum Sari untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan desa wisata khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Pandansari juga perlu mengupayakan integrasi Desa Wisata Pandansari ke dalam program BUMDes. Dengan demikian, potensi Desa Wisata Pandansari dapat dikelola secara lebih terstruktur dan memperoleh dukungan yang lebih signifikan sehingga berdampak pada pemasukan kas desa.

### 2. Bagi Disparpora Kab. Batang

Disparpora Kab. Batang perlu memperluas cakupan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya terfokus pada anggota pokdarwisnya saja, tetapi juga menjangkau masyarakat Desa Pandansari secara keseluruhan. Disparpora Kab. Batang juga diharapkan dapat mengupayakan peningkatan frekuensi pelatihan dan perencanaan target pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan organisasi pokdarwis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan kapabilitas internal Kopal Etom, adanya pelatihan yang berjalan konsisten dan berkelanjutan, serta

meningkatkan keberhasilan implementasi ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam pengelolaan Desa Wisata Pandansari. Selain itu, Disparpora Kab. Batang juga dapat meningkatkan peranannya khususnya sebagai dinamisor, yaitu dengan memberikan evaluasi dan *monitoring* secara rutin dan berkontribusi dalam proses terjalinnya kerja sama yang terjadi antara pokdarwis dengan pihak lainnya.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian dan penyusunan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan masukan dan saran yang diharapkan kepada peneliti supaya mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah desa, dinas pariwisata, dan kelompok sadar wisata. Selain itu, peneliti lain juga dapat menyoroti peran pihak eksternal seperti sektor swasta dalam mendukung pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh peran pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Pandansari dan dapat menghasilkan sudut pandang yang beragam, tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Mutiara N.L., Desi Wulandari, & Aditya Marianti. (2021). Tantangan Mewujudkan Ekowisata Sungai Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Manusia Dan Melindungi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Conservation*, 10(2), 72-77.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design*. (3th ed). California: SAGE Publications.
- Diatmika, I Putu Gede dan Sri Rahayu. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Malang: Ahlimedia Press.
- Febriandhika, Ikke dan Teguh K. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui *Community-Based Tourism*: Sebuah Review Literatur. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 50-56.
- Hadiwijoyo, Suryo S. (2018). *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Iswanti, S. I. S., dan Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.
- Kememparekraf.go.id. (2022, 08 Agustus). Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kememparekraf/Bparekraf Tahun 2022. Diakses melalui <https://bit.ly/KememparekrafPelatihanToTTrainingofTrainers>
- Lili, Lestari O dan Aldi H. Lasso. (2020). Peran Pemerintah Desa Kreditan dalam Pembangunan Pariwisata. *Jurnal KRITIS*, 29(2), 102-119.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nuha, F. K. (2022). Peran Pemerintah Gampong dalam Pengembangan Desa Wisata di Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nurbaiti, Usman. dkk. (2022). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Model *Community Based Tourism* (CBT) Di Desa Pengundang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(2), 746-758.
- Patilaila, Hairudin L. dan kawan-kawan. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
- Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Batang
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- Pitana dan Gayantri. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Prakoso, Aditha A., M. Sani R., dan Eugenius Pradipt. (2020). Community Based Tourism: Concepts, Opportunities And Challenges. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 2(2), 95-107.
- Purwowitzhu, CS. (2023, 16 Mei). Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi. Diakses melalui <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>

- Qonaah, Siti. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility PT PLN Distribusi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan Melalui Program “PLN Peduli”. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 46-52.
- Riyanto, Janu. (2019). Budaya Pengembangan Wisata Berbasis Budaya Kerajaan di Pura Pakualaman dan Kampung Wisata Pakualaman. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 5(10), 29-41.
- Rukayat, Yayat. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sabtimarlia, Lia. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, DIY. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (19th ed). Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suprpto, Riant Nugroho F. An. (2021a). *Membangun Desa Wisata Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- Suprpto, Riant Nugroho F. An. (2021b). *Membangun Desa Wisata Bagian 2: Strategi Desa Wisata*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Suprpto, Riant Nugroho F. An. (2021c). *Membangun Desa Wisata Bagian 3: Pengelolaan Desa Wisata*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 556/125/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 556/146/2020 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Batang.
- Susfenti, N. Erna Marlia. (2016). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-CBT) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 75-86.
- Sutrisno, Eri. (2023, 11 September). Ayo Jelajahi Desa Wisata Peraih Rekor MURI. Diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayojelajahi-desawisata-peraih-rekor-muri?lang=1>
- Tamianingsih dan Deby F. Eprilianto. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan *Community Based Tourism* (Studi Kasus Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *Publika*, 10(3), 1025-1040.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utami, Ajeng D. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Wibowo, A. R., dan Mulyono, S. E. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Budidaya Cacing. *Jurnal UNSRI*, 5(1), 54-60.
- Windarsari, W. R., Rohmat, R., Winarno, A., dan Hermawan, A. (2021). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) dan Pemberdayaan Potensi Pariwisata Lokal untuk Peluncuran Desa Wisata Kampung Kopi Sumberdem. *Jurnal Graha Pengabdian*, 3(3), 220-231.
- Wrihatnolo, dkk. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Yoeti, Oka A. (2008). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kompas.